

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBELUM DAN SETELAH DESENTRALISASI FISKAL 1990-2011**

**BASUKI RAHMAT  
A11109261**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBELUM DAN SETELAH DESENTRALISASI FISKAL 1990-2011**

**Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**BASUKI RAHMAT  
A11109261**



**Kepada**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBELUM DAN SETELAH DESENTRALISASI FISKAL 1990-2011**

disusun dan diajukan oleh

**BASUKI RAHMAT**

**A11109261**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Juni 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agussalim, SE., M.Si  
NIP. 19670817 199103 1 006

Dr. Nursini, SE., MA  
NIP. 19660117 199103 2 001

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Hj. Rahmatiah, SE., MA  
NIP. 19630625 198703 2 001

# SKRIPSI

## ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBELUM DAN SETELAH DESENTRALISASI FISKAL 1990-2011

disusun dan diajukan oleh

**BASUKI RAHMAT**  
**A11109261**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **21 Mei 2013** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Agussalim, SE., M.Si	Ketua	1 . . . . .
2. Dr. Nursini, SE., MA	Sekretaris	2 . . . . .
3. Dr. H. Abdul Hamid Paddu, SE., MA	Anggota	3 . . . . .
4. Dr. Hj. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA	Anggota	4 . . . . .
5. Drs. Ilham Tadjuddin, MSi	Anggota	5 . . . . .

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Hj. Rahmatiah, SE., MA  
NIP. 19630625 198703 2 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : BASUKI RAHMAT

NIM : A11109261

Jurusan/program studi : ILMU EKONOMI/STRATA SATU (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SEBELUM DAN SETELAH DESENTRALISASI FISKAL  
1990-2011**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dengan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur ciplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 April 2013

Yang membuat pernyataan

BASUKI RAHMAT

## **ABSTRAK**

Basuki Rahmat, 2013, Analisis Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal 1990-2011, di bawah bimbingan Dr. Agussalim, SE., MSi dan Dr. Nursini, SE., MA.

Tujuan penelitian untuk menganalisa perbedaan ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah desentralisasi fiskal, dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan baik sebelum maupun setelah desentralisasi fiskal 1990-2011.

Analisis regresi berganda dengan menggunakan EViews menunjukkan tidak ada perbedaan ketimpangan wilayah yang signifikan antara periode sebelum dan setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal. Tingkat pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan baik sebelum maupun setelah desentralisasi fiskal. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah desentralisasi fiskal, sedangkan pengeluaran pemerintah tidak signifikan sebelum desentralisasi terhadap ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan baik sebelum maupun setelah desentralisasi fiskal.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Wilayah, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Desentralisasi Fiskal

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dan kemuliaan yang agung penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, atas Rahmat, Anugerah dan Perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal 1990-2011”** ini sesuai pada waktunya. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan baik.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

- Kedua orang tua, Arsyad Dg.Rate dan Sawatia Dg.Lobo, atas doa, jasa, perhatian, bimbingan, dan pengorbanannya yang telah dicurahkan dan yang selalu sayang dan selalu berjuang hanya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik buat saya, tak banyak yang dapat saya lakukan untuk dapat membalas segala pengorbanan dan kasih sayang mereka selain doa yang tulus dan ikhlas kepada ALLAH SWT agar beliau sehat selalu dan beserta dalam lindungan\_NYA.
- Ibu Prof. DR. Hj. Rahmatia, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Ekonomi.

- Bapak Dr. Agussalim, SE., MSi selaku pembimbing I, yang tak bosan-bosannya mencoret dan memberi arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Dr. Nursini, SE., MA Selaku Pembimbing II sekaligus penasehat akademik, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama masa menempuh studi di Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Hasanuddin.
- Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih atas pembelajaran selama tahun kuliah penulis.
- Pak Parman, Pak Akbar, Pak Masse, Pak Hardi, Pak Safar, Pak Budi, Ibu Ros, dan seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi Unhas yang senantiasa memberi bantuan kepada penulis selama ini.
- Ketiga Kakak super saya yang selalu memberikan arahan dan dukungannya kepada saya selama ini hingga skripsi ini selesai, tak ada yang lebih berarti saya rasakan selain rasa bangga menjadi saudara kalian, Buat K' Tamin, K' Damir, dan K' Risna, Terimah Kasih k'.
- Saudara-saudara seangkatan SPARTAN 2009. Terima kasih untuk segala bantuan, pembelajaran, dan kenangan yang indah yang telah diberikan selama penulis menempuh masa perkuliahan. Saya sebut satu2 yah: Qibo, Farel, Uli, Alif, Kanda Ancha, Ular (bajakannya pacea), Jenggot, Eky, Cakis, Yoshi, Tika behel, Mancekz, Debbie, Fanny, Biku, Mamet, Tami, Anas, Yhezkiel (masih adaji kayaknya), Tika Korea, Rifa, Sami'un, Muge' (muka surga bede), Chaca, Ony Chacool, Daya (bukan sudiang), Mas Indra (makin tua makin jadi), Nisa, Firman, Group Halte (dewa, Suparmanto, Chris, dan Akbar), Ryan, Boge', Rahma, Imha (se\_Ibu tapi

tak se\_Ayah), Yuyun (paling Cempreg dan calleda), Daud, Rara, Yusron, Ikki', Babadel, syahrir, Yassir, Rusman, Lidya, Ani, Devi, Irfan, Accul (Ujung Tombaknya SPARTAN), Resi, Abduh, Kingking, dan Wawan, yang sudah sarjana makin sukses, dan yang belum sarjana cepat selesai Kawand.!!!

- Kanda Zul, Komkom, Al.Faraby, Kifli, Sazkia "Gotik", Liehong, dan Fitri, terima kasih atas perjuangan kita bersama mengerjakan tugas akhir, bantuan kalian dan doa kita bersama hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Keluarga kecil PALDANA, Mas Indra, Mail, Herman, Cojie, K' Arwan, K' Ilo, Mas Endeng, K' Ilyas, K' Supri dan Mu'li. Jaya terus PALDANA.!!!!
- Sahabat, teman, dan pihak-pihak yang mungkin tak bisa disebutkan satu per satu. Namun kebaikan-kebaikan dari nama-nama yang tidak tertulis disini, insya Allah tetap dicatat oleh malaikat-malaikat-Nya. Terima kasih semuanya.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan makna positif bagi perkembangan Ilmu Ekonomi. Amin.

Makassar, 22 April 2013

**Basuki Rahmat**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel dan Grafik.....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Ketimpangan Wilayah .....	10
2.1.2 Desentralisasi Fiskal .....	15
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi .....	21
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah .....	28
2.1.5 Hubungan Teoritis Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Wilayah ..	34
2.2 Tinjauan Empiris .....	40

2.3 Kerangka Pikir Penelitian .....	44
2.4 Hipotesis .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	47
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	47
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	47
3.4 Metode Analisis .....	49
3.5 Definisi Operasional Variabel .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan .....	53
4.1.1 Kondisi Geografis .....	53
4.1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk .....	53
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian .....	54
4.2.1 Perkembangan Jumlah Siswa/Penduduk Tamat SLTA di Provinsi Sulawesi Selatan .....	54
4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi .....	56
4.2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan .....	56
4.2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2011 .....	61
4.3 Rasio Total Pengeluaran Pembangunan Terhadap Total APBD .....	65
4.4 Perbedaan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum dan Setelah desentralisasi Fiskal .....	69

4.5 Analisis Data .....	72
4.5.1 Hasil Uji Statistik .....	73
4.5.1.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	73
4.5.1.2 Uji F .....	73
4.5.1.3 Uji t .....	75
4.5.2 Interpretasi Model .....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	85
5.1 Kesimpulan .....	85
5.2 Saran .....	86
Daftar Pustaka .....	88
Lampiran.....	91

## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

<b>Tabel/Grafik</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 4.1	Penduduk/Siswa Tamat SMA Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1990-2011.....	48
Tabel 4.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1990-2011.....	50
Tabel 4.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011.....	54
Tabel 4.4	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2011.....	56
Tabel 4.5	Rasio Total Pengeluaran Pembangunan Terhadap Total APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1990-2011.....	60
Tabel 4.6	Indeks Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.....	62
Tabel 4.7	Uji Signifikansi t ( $\alpha = 0,05$ ).....	67
Tabel 4.8	Hasil Estimasi Pada Periode Sebelum Desentralisasi Fiskal dengan Menggunakan EViews 3.....	69
Tabel 4.8	Hasil Estimasi Pada Periode Setelah Desentralisasi Fiskal Dengan Menggunakan EViews 3.....	70
Tabel 4.9	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1990-2000.....	87
Tabel 4.10	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011.....	88
Grafik 4.1	Trend Indeks Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan...	62

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Tabel Variabel Dependen dan Independen Yang Diteliti.....	84
2 Hasil Pengujian Dengan Menggunakan SPSS 16,0.....	85
3 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1990-2000.....	87
4 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2011.....	88

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai suatu negara dengan ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari Indonesia. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga suatu keniscayaan bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakteragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun hasilnya, yakni pendapatan antar daerah (Sianturi, 2011).

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan wilayah antara daerah maju dengan daerah yang tertinggal serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia. Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Meskipun ketimpangan itu sendiri adalah suatu yang selalu ada dalam proses pembangunan, khususnya pada tahap-tahap awal pembangunan, namun ketimpangan yang semakin melebar harus dihindari. Ketimpangan yang semakin lebar akan melahirkan berbagai ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat menimbulkan keresahan yang berujung pada berbagai macam konflik. Konflik itu bisa terjadi antar masyarakat, antar daerah, atau masyarakat dengan pemerintah maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, proses pembangunan dilaksanakan secara sentralistis. Pemerintah pusat menempatkan dirinya sebagai penggerak utama dalam upaya akselerasi pembangunan diseluruh pelosok tanah air. Berbagai kebijakan pembangunan diputuskan secara terpusat dengan instrumen utamanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sentralisasi berbagai keputusan pada pemerintah pusat semakin memperbesar inefisiensi, karena banyak proyek-proyek yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah.

Pemerintah pusat ingin memegang kendali yang erat atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi. Sejak runtuhnya masa orde baru, semangat untuk otonomi daerah dan desentralisasi kembali menguat, terlebih untuk daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Hal ini banyak dilakukan dengan tuntutan untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Timor-Timor, Aceh, dan Papua.

Untuk menjaga integrasi nasional terhadap kondisi ini serta menjawab atas tuntutan masyarakat daerah, maka pada masa pemerintahan Habibie dikeluarkanlah satu paket kebijakan tentang Otonomi Daerah berupa UU. No.

22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Kedua undang-undang ini kemudian diamandemen menjadi UU No. 32 dan No. 33 tahun 2004.

Desentralisasi merupakan suatu tuntutan reformasi yaitu adanya keadilan dalam bidang politik dan ekonomi bagi masyarakat daerah. Keadilan yang masih di rasa kurang ini dianggap sebagai penyebab munculnya ras tidak puas terhadap pemerintah oleh masyarakat daerah.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk wewenang yang dimiliki pemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU No. 22/1999. Praktek desentralisasi fiskal baru dijalankan di Indonesia pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah "*Money Follows Functions*", yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang kemudian diperbaiki oleh pemerintah melalui revisi kedua undang-undang tersebut menjadi UU No. 32 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 22 tahun 1999) tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 25 tahun 1999) tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Permasalahan yang muncul dalam penerapan kedua UU tersebut antara lain (RPJMN 2004-2009):

- 1) Belum jelasnya pembagian kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah;
- 2) Berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; 3) Masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah; 4) Belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien; 5) Masih terbatas dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah; 6) masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah; 7) pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan keuangan Pusat-Daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya PAD dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai dana non PKPD, karena berasal dari pengelolaan fiskal daerah. Khusus pinjaman daerah pemerintah pusat masih khawatir dengan kondisi utang negara, sehingga belum mengizinkan penerbitan utang daerah.

Hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003). Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002). Otonomi daerah tidak hanya berhenti pada pembagian dana pembangunan yang relatif "adil" antara pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan dalam bentuk dana

perimbangan (*balancing fund*), tetapi keberhasilan otonomi daerah juga diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh sebab itu, implementasi otonomi daerah tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemerintah daerah, yakni Bupati atau Walikota serta perangkat daerah lainnya, tetapi juga seluruh masyarakat lokal di tiap-tiap daerah (Saragih, 2003).

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui UU No. 33 Tahun 2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sumber-sumber penerimaan daerah ini memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya yaitu dengan meluaskan jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil Sumber Daya Alam dengan pemerintah pusat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Waluyo dari Univeristas Pembangunan Nasional tentang kasus desentralisasi fiskal dan ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia, proses desentralisasi fiskal lebih terasa di wilayah Indonesia bagian timur di banding dengan wilayah Indonesia bagian barat. Dampak desentralisasi fiskal di wilayah Indonesia timur terlihat dengan pertumbuhan daerah yang lebih besar dibanding sebelum diterapkannya desentralisasi fiskal. Sementara di wilayah Indonesia bagian barat, seperti Pulau Jawa dan Bali pertumbuhan

ekonominya yang paling rendah sejak diterapkannya desentralisasi fiskal. Dana bagi hasil SDA (DBSDA) menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negatif. Hanya daerah kaya SDA (Riau, dan Kaltim) yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi positif. Di samping itu kebijakan bagi hasil SDA memperburuk kesenjangan pendapatan antardaerah. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah di Indonesia.

Fenomena kesenjangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tidaklah sekompleks dengan tingkat nasional, namun isu ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regional, sehingga dapat ditekan. Dimana ekonomi Sulawesi Selatan selama ini lebih banyak bergantung pada sektor pertanian.

Capello (2007) dalam Haryanto (2010), menyebutkan bahwa analisis pembangunan wilayah mensyaratkan dua hal, yaitu pertumbuhan absolut yang menunjukkan kemampuan sumber daya yang potensial di wilayah tersebut dan pertumbuhan relatif antar wilayah yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan ketimpangan regional dan kemungkinan dari konvergensi pada tingkat pertumbuhannya atau pendapatan rata-ratanya. Disparitas pembangunan ekonomi regional merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Demikian pula pergeseran komposisi sektor-sektor pembangunan karena aktivitas ekonomi. Tidak mengherankan bila di

setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang akibat transformasi dengan kecepatan yang berbeda.

Pemerintah berperan cukup besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena pemerintah merupakan penggerak utama pembangunan. Anggaran pembiayaan pembangunan menjadi pedoman dalam membiayai tugas negara berasal dari berbagai sumber pendapatan baik dalam maupun luar negeri dan dapat dipergunakan sebagai alat kebijaksanaan ekonomi. Oleh sebab itu, anggaran negara harus sesuai prinsip dengan kondisi dan keadaan ekonomi. Dan anggaran negara dapat dipergunakan sebagai alat kebijaksanaan fiskal dalam mempengaruhi pendapatan nasional, karena dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah baik secara jumlah maupun proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan peningkatan aktivitas pemerintah yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat judul penelitian sebagai berikut: “Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal 1990-2011”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan signifikan ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah desentralisasi fiskal?

2. Apakah tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah desentralisasi fiskal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis adanya perbedaan ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah dilaksanakan desentralisasi fiskal.
2. Mengukur dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah desentralisasi fiskal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi untuk mengetahui bagaimana ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum dan setelah desentralisasi fiskal, serta bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut

pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, serta pemerataan ketimpangan antar wilayah.

3. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya terkait dengan masalah yang sama sekaligus sebagai wahana untuk mengaplikasikan pemahaman penulis tentang teori-teori yang didapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Ketimpangan Wilayah**

Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan muncul karena adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Sehingga kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, pada setiap daerah terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Ketimpangan juga memberikan implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang akan mempengaruhi formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah (Sjafrizal, 1997).

Dalam laporan Pembangunan Dunia tahun 2006, publikasi World Bank, dinyatakan bahwa ketimpangan (baik antar wilayah maupun antar negara) merupakan hal yang penting dalam pembangunan, karena ketimpangan mempengaruhi proses pembangunan jangka panjang. Dua

saluran yang digunakan ketimpangan untuk mempengaruhi pembangunan dalam jangka panjang adalah melalui pengaruh-pengaruh kesempatan yang timpang ketika kondisi pasar tidak sempurna dan berbagai kosekuensi ketimpangan untuk kualitas institusi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat.

Lebih lanjut, World Bank dalam laporannya tersebut menyatakan bahwa faktor-faktor geografis dan historis yang mendasari ketimpangan antar wilayah sangat kompleks dan tumpang tindih. Kemampuan mengelola sumber daya yang rendah dan jarak dari pasar yang jauh dapat menghambat proses pembangunan di kawasan-kawasan tertinggal. Dalam banyak kasus, perbedaan-perbedaan ekonomi itu disebabkan oleh relasi yang tidak setara dan sudah berlangsung lama, antara kawasan-kawasan yang maju dengan yang tertinggal, serta kelemahan institusional pada waktu sebelumnya.

Myrdal (1957) dalam Jhingan (2007) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional diantara negara-negara terbelakang.

*Spread effect* didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (*favorable effect*), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitar. *Backwash effect* didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (*infavorable effect*) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi

wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Lebih lanjut, Myrdal mengemukakan ketimpangan regional terjadi akibat besarnya pengaruh *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang.

Myrdal menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya melalui dampak baik (*backwas effect*) dan dampak sebar (*spread effect*). *Backwash effect* terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (mis: wilayah A) mengakibatkan terjadinya perpindahan sumber daya (tenaga kerja, modal, dll) dari wilayah di sekitarnya (mis: wilayah B). sehingga wilayah A (yang awalnya merupakan wilayah yang lebih maju dibandingkan wilayah B), akan semakin maju dan wilayah B akan semakin tertinggal. *Spread effect* terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (mis: wilayah A) mengakibatkan pertumbuhan wilayah disekitarnya (mis: wilayah B), yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri yang sedang tumbuh di sentra-sentra tersebut, dan sentra-sentra yang mempunyai industri barang-barang konsumsi akan terangsang. Selanjutnya Myrdal menyimpulkan ketimpangan wilayah disebabkan oleh lemahnya dampak sebar (*spread effect*) dan kuatnya dampak balik (*backwash effect*).

Kuznets (1957) dalam Tambunan (2003) mengemukakan suatu hipotesis yang terkenal dengan sebutan "Hipotesis U terbalik". Hipotesis ini dihasilkan melalui suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara di dunia, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terdapat *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor

modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan disektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional. Akan tetapi dalam jangka panjang , pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (*maturity*) dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas serta mobilitas semua faktor-faktor produksi antar negara tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan *output* antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan rata-rata-nya yang semakin tinggi di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan.

Salah satu kajian yang menguatkan hipotesis Kuznet tersebut dilakukan oleh Williamson (1965) dalam Tambunan (2003). Williamson untuk pertama kalinya menyelidiki masalah ketimpangan antar daerah dengan membobot perhitungan *coeffisient of variation (CV)* dengan jumlah penduduk menurut wilayah. Dalam studinya ia menemukan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi disparitas dalam pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif maju, misalnya dalam pembangunan industri, infrastruktur, dan SDM. Kemudian dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terjadi konvergensi dan ketimpangan wilayah akan mengalami penurunan.

Ukuran ketimpangan wilayah untuk menganalisis seberapa besar kesenjangan antar wilayah/daerah, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, dan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan melalui perhitungan Indeks Williamson. Weigthed Coefficient Variation (CV) merupakan indeks variasi pendapatan antar daerah dalam suatu wilayah. Keunggulan koefisien variasi adalah mudah dan praktis untuk melihat disparitas antar daerah. Koefisien yang diperoleh dikenal sebagai koefisien

variasi Williamsom. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Pada dasarnya Indeks Williamsom merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dan rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah. Dimana, Jeffrey Williamson menyimpulkan bahwa ketidakmerataan yang timbul berdampak sedikit terhadap akumulasi modal Amerika pada abad ke-19 dan untuk Inggris tidak berdampak sama sekali. Namun ketidakmerataan yang timbul memang memegang peranan penting dalam sulitnya akumulasi modal.

Berdasar prinsip kausasi sirkuler kumulatif, dapat dijelaskan terjadinya ketidakmerataan (ketimpangan) ekonomi (internasional, nasional dan regional). Apabila proses kausasi sirkuler kumulatif dibiarkan bekerja atas kekuatan sendiri, maka akan menimbulkan pengaruh merambat yang ekspansional di suatu pihak (*spread effects*) dan pengaruh pengurangan (*backwash effects*). Strategi campur tangan pemerintah yang dikehendaki adalah pengambilan tindakan kebijakan yang melemahkan *backwash effects* dan memperkuat *spread effects*, agar supaya proses kausasi sirkuler kumulatif mengarah ke atas, dan dengan demikian semakin memperkecil ketimpangan. Ketimpangan sangat tidak dikehendaki oleh semua bangsa, dan sebaliknya doktrin pemerataan dan persamaan melahirkan ajaran keseimbangan umum (*general equilibrium*).

Adisasmita (2007), Untuk menanggulangi masalah keterbelakangan, ketidakmerataan dan kemiskinan dalam pembangunan dihadapi proses lingkaran tidak berujung pangkal (*vicious circle*). Daerah yang terbelakang karena masyarakatnya miskin, mereka menjadi miskin karena mereka terbelakang (kapasitas sumber daya manusianya lemah serta kesediaan

prasarana dan sarana pembangunan terbatas). Ketimpangan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan yang cenderung bertambah semakin besar, demikian pula dalam hal kesenjangan antar daerah akan menjadi besar.

Ekspansi di suatu tempat (misalnya daerah perkotaan) mempunyai pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) terhadap tempat lain atau tempat di sekitarnya (daerah pedesaan). Arus perpindahan tenaga kerja (migrasi), perpindahan modal dan perdagangan merupakan sarana bagi proses kumulatif, mengarah ke atas di daerah yang bernasib baik dan mengarah ke bawah di daerah yang bernasib tidak baik. Karena migrasi itu sifatnya selektif (yaitu dilakukan oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan keterampilan), maka cenderung akan menguntungkan daerah atau tempat yang sedang mengalami ekspansi yang cepat dan merugikan daerah-daerah lainnya.

### **2.1.2 Desentralisasi Fiskal**

Dalam rangka sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi pada masa pemerintahan orde baru, Undang-undang No.5 tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dibentuk. Undang-undang tersebut telah meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip: *pertama*, Desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah daerah tingkat atasnya kepada daerah. *Kedua*, dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. *Ketiga*, tugas perbantuan (*medebewind*) yang berarti pengkoordinasian prinsip

desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah. Akibat prinsip ini dikenal adanya otonom dan wilayah administrative.

Lahirnya kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disusul dengan kebijakan desentralisasi fiskal dengan landasan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak terlepas dari tuntutan reformasi yang bergulir beberapa tahun sebelumnya, dimana puncak tuntutan reformasi tersebut terjadi pada tahun 1998.

Mardiasmo (1999), mengemukakan bahwa salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Tuntutan seperti ini adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Arahan dan *statutory requirement* yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bastin dan Smoke (1992) dalam Mardiasmo (2002), besarnya arahan dari pemerintah pusat itu didasarkan pada dua alasan, yaitu untuk menjamin stabilitas nasional, dan karena kondisi sumber daya manusia daerah yang dirasa masih relatif lemah. Karena dua alasan ini, sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya pandangan

ini terbukti benar. Sepanjang tahun 70-an dan 80-an misalnya, Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang mantap. Namun dalam jangka panjang, sentralisasi seperti itu telah memunculkan masalah rendahnya akuntabilitas, memperlambat pembangunan infrastruktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik, serta memperlambat pengembangan kelembagaan social ekonomi di daerah.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiriberdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan Negara dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugas bantukan kepada daerah.

Menurut Sondakh (1999) dalam Tambunan (2001), ada tiga faktor yang memicu bangkitnya tuntutan tersebut, yakni sentiment regional, ketimpangan dan ketidakberdayaan ekonomi, dan represi dan pelanggaran hak-hak masyarakat lokal. Dari ketiga faktor tersebut, ketimpangan merupakan faktor pemicu paling utama. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat

di Aceh atau di Irian Jaya tidak akan menuntut merdeka apabila selama pemerintahan Orde Baru pembagian penghasilan dari ekspor SDA yang mereka miliki dilakukan secara adil.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka Pemerintah Daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Dalam era otonomi daerah, manajemen keuangan daerah yang baik merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemerintah dan pembangunan di tingkat lokal. Dalam hubungan antar pusat dan daerah, pemerintah saat ini telah mengalokasikan dana perimbangan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi pemerintahan.

Berdasarkan pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan.

Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar

otonom. Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah adalah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*) (Ehtisham, 2002) dalam (Solihin, 2012). Penggunaan DAU, DBHP dan DBH SDA (*block grants*) diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah. Pada penerapannya DAU banyak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin terutama untuk belanja pegawai sebagai dampak pengalihan status pegawai pusat menjadi pegawai Pemda, sedangkan penggunaan DAK telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Melalui kebijakan bagi hasil SDA diharapkan masyarakat daerah dapat merasakan hasil dari sumber daya alam yang dimilikinya. Mekanisme bagi hasil SDA dan pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) pusat-daerah. Walaupun Indonesia terkenal sebagai daerah yang kaya akan SDA tetapi persebarannya tidak merata di seluruh daerah. Daerah kaya SDA misalnya Riau, Kalimantan Timur, Aceh, dan Papua akan mendapatkan dana bagi hasil yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lain yang miskin sumber daya alam. Pada sisi yang lain Jakarta dan kota besar lainnya akan memperoleh dana bagi hasil pajak (PBB, BPHTB, dan PPh) yang cukup besar, sebagai konsekuensi terkonsentrasinya pusat bisnis di kota metropolitan. Fenomena seperti ini akan berdampak terhadap meningkatnya ketimpangan fiskal antar daerah, yang pada akhirnya melalui kebijakan ekspansi pengeluaran pemerintah daerah dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan antardaerah dan wilayah, Mardiasmo (2002).

Belajar dari pengalaman internasional, pelaksanaan otonomi daerah tidak selalu harus dibiayai oleh pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Namun, secara pasti dapat dikatakan bahwa apabila semakin maju industri suatu Negara maka pelaksanaan demokrasi akan semakin baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin demokratis akan tercermin dalam pelaksanaan otonomi daerah yang semakin besar. Pelaksanaan otonomi yang semakin besar tersebut dari aspek keuangan tercermin dari *expenditure ratio* yang cenderung semakin besar. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dalam suatu negara tidak selalu harus diukur dari besarnya peranan PAD untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintahan daerah.

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, Mardiasmo (2002).

Momentum daerah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan membangun daerahnya. Untuk itu, hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga (*institutional reform*), perbaikan system manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik. Oleh karena itu, untuk dapat membangun landasan perubahan yang kuat,

pemerintah perlu melakukan perenungan kembali (*rethinking government*) yang kemudian diikuti dengan reinventing government untuk menciptakan pemerintahan baru yang lebih baik.

### **2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Setiap negara di dunia ini sudah lama menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor yang paling penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara untuk jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan standar hidup (*standar of living*) penduduk yang jumlahnya terus meningkat.

Kuznets dalam kuliahnya pada peringatan Nobel dalam Jhingan (2007) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Defenisi ini memiliki tiga komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Teknologi modern misalnya, tidak

cocok dengan corak/kehidupan desa, pola keluarga besar, usaha keluarga, dan buta huruf.

Tarigan (2005), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Biasanya BPS dalam menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia angka dalam harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Dalam Tambunan (2003), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan

penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDB yang terus menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional.

Razak (2009), aktivitas pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di suatu Negara atau daerah dapat dilihat hasilnya pada dampak yang ditimbulkannya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Negara atau daerah tersebut. Salah satu indikator dimana hasil pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di suatu Negara tau daerah itu dapat dilihat secara langsung adalah pada adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Negara atau daerah yang bersangkutan.

Teori-teori awal pertumbuhan ekonomi umumnya menyoroti masalah pentingnya akumulasi modal. Artinya, sebuah Negara atau daerah bisa menjadi kaya jika ia memiliki kemampuan untuk mengakumulasi modal. Sebaliknya, Negara atau daerah yang tidak memiliki akses terhadap modal akan terus miskin. Ini antara lain kesimpulan dari model Harrod-Domard pada tahun 1940-an dan model Kaldor serta Solow-Swan pada tahun 1950-an.

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa *perburuan*, *masa beternak*, *masa bercocok tanam*, *perdagangan*, dan yang terakhir adalah *tahap perindustrian*. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi

akan semakin terpacu dengan adanya system pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi.

Karl Marx dalam bukunya *Das Kapital* dalam Kuncoro (1997) membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dimulai dari *feodalisme*, *kapitalisme* dan kemudian yang terakhir adalah *sosialisme*. Evolusi perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi dimana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Dalam tahap ini tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar-menawar tertinggi relatif terhadap pelaku ekonomi lain. Perkembangan teknologi yang ada menyebabkan terjadinya pergeseran di sektor ekonomi, dimana masyarakat yang semula agraris-feodal kemudian mulai beralih menjadi masyarakat industri yang kapitalis.

Seperti halnya pada masa feodal, pada masa kapitalisme ini para pengusaha merupakan pihak yang memiliki tingkat posisi tawar menawar tertinggi relatif terhadap pihak lain khususnya kaum buruh. Marx menyesuaikan asumsinya terhadap cara pandang ekonomi klasik ketika itu dengan memandang buruh sebagai salah satu input dalam proses produksi. Artinya buruh tidak memiliki posisi tawar menawar sama sekali terhadap para majikannya, yang merupakan kaum kapitalis. Konsekuensi logis penggunaan asumsi dasar tersebut adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan para pengusaha terhadap buruh. Eksploitasi terhadap kaum buruh dan peningkatan pengangguran yang terjadi akibat substitusi tenaga manusia dengan input modal yang padat kapital, pada akhirnya akan menyebabkan revolusi sosial yang dilakukan oleh kaum buruh. Fase ini

merupakan tonggak baru bagi munculnya suatu tatanan sosial alternatif di samping tata masyarakat kapitalis, yaitu tata masyarakat sosial.

Teori Rostow didasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah dialami oleh Negara-negara maju terutama di Eropa dari mulai abad pertengahan hingga abad modern, maka kemudian Rostow memformulasikan pola pembangunan yang ada menjadi tahap-tahap evolusi dari suatu pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut.

Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu Negara menjadi lima tahap yaitu: (1) tahap perekonomian tradisional; (2) tahap prakondisi tinggal landas; (3) tahap tinggal landas; (4) tahap menuju kedewasaan; (5) tahap konsumsi massa tinggi.

Jhingan (2007), model pertumbuhan Harrod-Domar dibangun berdasarkan pengalaman Negara maju. Kesemuanya terutama dialamatkan kepada perekonomian kapitalis maju dan mencoba menelaah persyaratan pertumbuhan mantap (*steady growth*) dalam perekonomian seperti itu.

Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. *Pertama* ia menciptakan pendapatan, dan *kedua*, ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat disebut sebagai “dampak permintaan” dan yang kedua “dampak penawaran” investasi. Karena itu, selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa . namun demikian, untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat. Kalau tidak, setiap perbedaan antara

keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas nganggur (*idle*). Hal ini memaksa para pengusaha membatasi pengeluaran investasinya sehingga akhirnya akan berepengaruh buruk pada perekonomian yaitu menurunkan pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya dan menggeser perekonomian keluar jalur ekuilibrium pertumbuhan mantap. Jadi apabila pekerjaan hendak dipertahankan dalam jangka panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar. Ini lebih lanjut memerlukan pertumbuhan pendapatan nyata secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperlukan ini dapat disebut sebagai “tingkat pertumbuhan terjamin” (*warranted rate of growth*) atau “tingkat pertumbuhan kapasitas penuh”.

Dalam Jhingan (2007), proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia modal, usaha, teknologi, dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non-ekonomi.

Dalam suatu studinya, Bauer dalam Jhingan (2007) menunjukkan bahwa *penentuan utama* pertumbuhan ekonomi adalah , kemampuan, kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, adat-istiadat, nilai, tujuan dan motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan.

Salah satu dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu wilayah adalah dengan menggunakan besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB disajikan atas dasar

harga berlaku (sesuai dengan pasar/transaksi pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga pasar pada tahun tertentu).

Perubahan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun penghitungan masih memuat akibat terjadinya inflasi/deflasi sehingga tidak memperlihatkan pertumbuhan atau perubahan PDRB secara riil. Sebaliknya, PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pasar pada tahun tertentu, sehingga perubahan besaran PDRB sudah terlepas dari pengaruh inflasi/deflasi.

Besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah dipengaruhi oleh besarnya sumberdaya alam yang telah dimanfaatkan dan macamnya, jumlah dan mutu sumberdaya manusia, kebijaksanaan pemerintah, letak geografis serta tersedianya sarana dan prasarana. Dalam menghitung pendapatan regional, memasukkan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan usahanya di suatu wilayah atau daerah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi. Dengan demikian, PDRB secara keseluruhan menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Horst Sieber (1969) dalam Razak (2009), menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah adalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal yang dimaksud adalah potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah (region), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, seperti fasilitas transportasi, ketersediaan pasar bagi barang dan jasa (output) yang dihasilkan oleh daerah yang

bersangkutan, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal meliputi tingkat mobilitas perpindahan faktor produksi tenaga kerja, modal dan teknologi serta barang dan jasa dari dan ke masing-masing daerah (region) tersebut.

Razak (2009), mengemukakan bahwa Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ekonominya, maka setiap daerah akan membutuhkan faktor-faktor produksi, dimana faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh setiap daerah tersebut tidak seluruhnya tersedia di dalam daerahnya. Demikian pula bahwa senantiasa terjadi perbedaan jenis, jumlah dan kualitas faktor produksi yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga tidak mampu untuk menghasilkan sendiri seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Disamping itu, untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan, maka pasar domestik setiap Negara tidak mampu menyerapnya, sehingga harus dipasarkan pula ke daerah-daerah atau Negara-negara lain. Akibatnya, pembangunan ekonomi di setiap daerah, selain ditentukan oleh faktor di dalam daerah (faktor internal) juga akan sangat tergantung kepada faktor-faktor eksternal, yakni faktor penentu yang berasal dari luar daerah atau luar negeri. Besarnya pengaruh faktor-faktor penentu eksternal tersebut bagi setiap daerah adalah sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya ekonomi di masing-masing daerah tersebut.

#### **2.1.4 Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi serta menciptakan pendapatan yang lebih merata.

Peran distribusi pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun lewat jalur pengeluarannya. Disisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan sah lainnya untuk kemudian direstribusikan secara adil dan proporsional. Dengan pola serupa pula pemerintah membelanjakan pengeluarannya.

Khusus bagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, kegiatan pemerintah pada umumnya selalu meningkat sehingga pengeluaran pemerintah juga meningkat yang mempengaruhi aktivitas perekonomian sehingga melancarkan proses pembangunan dan kemungkinannya untuk mendorong produksi domestik. Hal ini terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional.

Ada kaidah yang berusaha menjelaskan meningkatnya pengeluaran pemerintah dibarengi dengan meningkatnya kegiatan perekonomian. Kaidah ini terkenal dengan hukum Wagner yang menjelaskan adanya hubungan yang positif antara pengeluaran pemerintah dan aktivitas perekonomian yang jika dihubungkan dengan keadaan Indonesia, maka wajar pengeluaran pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Musgrave dan Rostow mengembangkan model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah, yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi.

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari negara tersebut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur. Pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana publik, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah

pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap menengah ini peranan pemerintah masih tetap besar karena peranan swasta yang semakin besar ini akan banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga pemerintah harus banyak menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan kualitas yang lebih baik. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Musgrave dan Rostow pada tahap lanjutan pembangunan ekonomi, investasi swasta dalam persentase GNP semakin besar, dan investasi pemerintah dalam persentase GNP semakin kecil. Melalui teori ini Musgrave dan Rostow berpendapat bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah akan beralih dari penyediaan barang dan jasa publik menjadi pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aktivitas social, misalnya program kesehatan hari tua, program kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow ini adalah suatu pandangan yang didasarkan pada pengamatan-pengamatan di banyak Negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di Negaranegara Eropa, Amerika, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu bentuk hukum, sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran

pemerintah juga akan meningkat. Wagner menyadari dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, industri dan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit dan kompleks. Dalam hal ini Wanger menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, dan sebagainya.

Namun Hukum Wagner ini mempunyai kelemahan dimana hukum tersebut tidak didasari oleh teori pemilihan barang-barang publik, namun didasarkan pada suatu teori organis mengenai pemerintah dalam aktivitasnya.

Teori Peacock dan Wiserman didasari oleh suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa untuk meningkatkan pengeluaran yang dilain pihak oleh masyarakat hal tersebut tidak disetujui karena akan memperbesar jumlah pajak yang hendak dibayar. Sehingga teori ini berbasis pada teori pemungutan suara. Bunyi teori Peacock dan Wiserman sebagai berikut: "perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat,. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar, begitu juga pengeluaran pemerintah semakin besar".

Peacock dan Wiserman menjelaskan dalam teori ini bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat memahami besarnya jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sehingga hal ini merupakan hambatan bagi pemerintah untuk menetapkan pemungutan pajak secara sepihak.

Mardiasmo (2002), menjelaskan bahwa pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang ini dinikmati pemerintah daerah kabupaten dan kota, memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Kemunculan UU No.22 dan 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public Oriented*) sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut yang lebih berbasis pada kepentingan publik, yang selanjutnya akan menumbuhkan pembangunan ekonomi wilayah yang lebih merata.

Razak (2009), mengemukakan bahwa salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah melalui pengeluaran pemerintah pada peningkatan pengeluaran pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor-sektor yang potensial dikembangkan pada kawasan tertentu yang memiliki faktor atau sumber daya pendorong pertumbuhan (*growing factors*). Oleh karena itu, dalam implementasinya, strategi pengembangan daerah perlu diarahkan pada sektor-sektor tertentu dalam suatu kawasan tertentu atau ditujukan untuk pengembangan antar sektor dalam suatu wilayah/daerah atau natar wilayah/daerah. Strategi pembangunan ekonomi daerah seperti ini akan mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat sekaligus akan mendorong terciptanya pemerataan dan stabilitas wilayah. Penerapan strategi pembangunan seperti ini adalah mengaitkan antara

kebijakan sektoral dengan kewilayahan melalui strategi konsolidasi dan strategi ekspansi serta strategi integrasi yang diseduaikan dengan karakteristik sektor dan daerah/wilayah bersangkutan.

Pelaksanaan strategi pembangunan ekonomi daerah yang berlandaskan pertumbuhan ekonomi antar sektor dan lintas sektor ekonomi serta antar wilayah dan lintas wilayah pada dasarnya dapat mewujudkan keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah, sehingga stabilitas dan pemerataan dapat diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas pembangunan ekonomi daerah harus terintegrasi, baik dalam bentuk keterkaitan antar sektor ekonomi maupun antar wilayah atau antar daerah. Dimana strategi ini dijamin dengan menerapkan strategi pembangunan tidak seimbang, dimana daerah pusat-pusat pertumbuhan dengan harapan akan dapat tercipta keterkaitan antar daerah yang selanjutnya akan tercipta daerah yang lebih maju akan mendorong daerah yang tertinggal.

Adisasmita (2007), mengemukakan bahwa melalui pengeluaran pembangunan, penyusunan rencana dan kebijaksanaan pembangunan yang aplikatif harus senantiasa mempertimbangkan kemampuan dan potensi masing-masing wilayah serta masalah-masalah mendesak yang dihadapi, sehingga upaya-upaya pembangunan yang berlangsung dalam tiap-tiap wilayah benar-benar sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah. Hal ini berarti bahwa peningkatan pembangunan sektoral yang akan tersebar di seluruh wilayah, sejauh mungkin akan dikaitkan dengan upaya pembangunan wilayah, baik untuk mengatasi permasalahan yang mendesak maupun untuk mengembangkan sumber-sumber potensial yang terdapat di dalam lingkungan masing-masing wilayah. Selanjutnya dalam implementasinya harus diperhatikan metode atau cara yang tepat digunakan agar supaya dapat

mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu pemerataan wilayah.

### **2.1.5 Hubungan Teoritis Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Wilayah**

Dalam pembahasan ini akan dilihat bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah.

**Pertama**, pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketimpangan wilayah. Sampai akhir-akhir ini, hampir semua Negara baik di Negara-negara maju maupun di Negara-negara berkembang berfokus pada hubungan-hubungan antara pendidikan, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan output. Hal ini tidaklah mengagetkan karena seperti yang telah kita ketahui tujuan pembangunan adalah memaksimalkan tingkat pertumbuhan output secara bersama-sama. Sebagai hasilnya, dampak atau pengaruh pendidikan terhadap pemerataan pendapatan dan usaha penghapusan kemiskinan absolut sebagian besar tersendat-sendat. Akan tetapi, studi-studi yang baru telah memperlihatkan bahwa disamping sebagai kekuatan yang umum untuk mengusahakan kebersamaan, sistem-sistem pendidikan di berbagai Negara yang sedang berkembang lebih banyak menciptakan peningkatan dari pada mengurangi ketimpangan-ketimpangan pendapatan ini, Todaro (2006).

Sjafrizal (1997), mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah perbedaan kondisi demografis, dimana yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan

kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian Prahara (2010) dalam Hariyanto (2010), sumber daya yang dicerminkan pada kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia berhubungan dengan proses produksi. Tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja merupakan modal utama bagi suatu daerah untuk berproduksi.

Kualitas sumber daya manusia juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Apabila kualitas sumber daya manusia di suatu daerah baik, maka diharapkan perekonomiannya juga akan lebih baik. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikan, kesehatan, atau indikator-indikator lainnya. Tingkat pendidikan yang baik akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas, serta menentukan kemampuan dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Adisasmita (2007), mengemukakan bahwa daerah-daerah yang terbelakang atau tertinggal itu mempunyai ketergantungan yang kuat dengan daerah luar, mereka melakukan kegiatan pembangunan ekonomi untuk menghilangkan keterbelakangan (*backwardness*) yang berarti pula untuk mengurangi ketergantungan (*dependency*), namun dalam upaya

pembangunan ekonomi dihadapi hambatan di bidang sosial (sikap, perilaku, dan pandangan hidup, kelembagaan, ilmu pengetahuan dan teknologi). Daerah-daerah yang terbelakang harus melakukan perubahan yang mendasar atau fundamental untuk mampu hidup berdiri sendiri, untuk tidak ketergantungan dan mampu melakukan perubahan fundamental diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berketerampilan.

Teori sumber daya manusia dan paradigma ketidaktergantungan dengan daerah lain merupakan pendekatan dasar yang prospektif untuk melakukan perubahan dan pembangunan ekonomi sosial dalam upaya mencapai sasaran jangka panjang, yaitu penguatan kemandirian lokal atau lokalitas itu sangat penting dan harus dipertimbangkan dalam pendekatan pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah lain agar tidak terjadi ketimpangan wilayah yang semakin melebar. Dan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan, perbaikan gizi, yang diharapkan akan menumbuhkan inisiatif atau prakarsa untuk menciptakan lapangan kerja baru, dengan demikian produktivitas nasional dan regional dapat ditingkatkan.

Tarigan (2005), mengemukakan bahwa sebetulnya apa yang diuraikan hingga saat ini adalah yang berkaitan dengan rencana pengembangan fisik dan struktur perekonomian. Perlu diingat bahwa pengembangan perekonomian, baik nasional maupun regional banyak ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengambil peran dalam gerak perekonomian. Sejalan dengan itu langkah-langkah untuk memperbaiki mutu SDM perlu terus digalakkan melalui pendidikan. Mutu SDM dibagi dalam dua aspek, yaitu aspek keahlian/keterampilan dan aspek moral/mental. Semakin tinggi kualitas SDM suatu daerah, maka pertumbuhan ekonomi di daerah

bersangkutan juga akan semakin meningkat, yang selanjutnya pertumbuhan ini tidak memberikan efek stimulus bagi daerah lain yang lebih tertinggal khususnya di daerah pedesaan, sehingga akan meningkatkan ketimpangan wilayah.

**Kedua**, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah. Secara garis besar, pengeluaran pemerintah terbagi atas tiga bagian yaitu sebagai berikut: pengeluaran pemerintah untuk kebijakan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa (*Exhaustive*), pengeluaran pemerintah untuk subsidi (*Government Transfer Payment*).

Pengeluaran pembangunan terdiri dari bantuan proyek dan bantuan program dimana bantuan proyek tersebut diarahkan untuk menciptakan prasarana dan sarana publik lewat pengadaan berbagai proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan, (Arsyad, 1992).

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi untuk pengeluaran pembangunan, antar lain alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan

listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut, Syafrizal (2008).

Pada Negara-negara sedang berkembang, ketimpangan wilayah dan kesejahteraan sangat lebar. Pengeluaran pemerintah cenderung untuk mempersempit jurang perbedaan tersebut, dimana pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan medis akan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi yang meningkat lewat kenaikan pengeluaran pemerintah, lapangan kerja meluas dan menyebar yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan kemampuan industrialisasi sehingga daerah yang tadinya tertinggal mampu berkembang dan memperkecil ketimpangan yang ada (Jhingan, 2007).

**Ketiga**, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan setiap Negara adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu memacu perkembangan ekonomi secara makro. Namun hal tersebut seringkali menyebabkan pendapatan antar daerah kurang merata akibat sumber daya alam dan keadaan geografis yang dimiliki oleh beberapa daerah kurang memadai dibanding dengan daerah-daerah yang maju.

Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan merupakan fungsi dari waktu. Pada tahap awal pembangunan, perbedaan laju pertumbuhan ekonomi regional yang cukup besar antar daerah telah mengakibatkan ketimpangan wilayah. Namun dalam jangka panjang, ketika faktor-faktor produksi di daerah semakin dioptimalkan dalam pembangunan maka perbedaan laju pertumbuhan output antar daerah akan cenderung menurun. Kondisi tersebut

sesuai dengan hipotesa kuznets yang dikenal dengan hipotesa U terbalik (inverted U hypothesis Kuznets), yang menyatakan bahwa kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang berbentuk U terbalik seiring waktu yang berjalan.

Dalam buku klasiknya yang berjudul *Poverty, Inequality, and Development*, Gary Fields dalam Todaro (2006), menunjukkan penggunaan kurva Lorenz untuk menganalisis tiga kasus terbatas dalam pembangunan dualistik. Ia membedakannya dalam tiga tipologi pembangunan. *Pertama*, tipologi pertumbuhan *perluasan sektor modern (modern-sector enlargement)*, dimana usaha pengembangan ekonomi dua sektor (sektor industri modern dan sektor pertanian tradisional) bertumpu pada pembinaan dan pemekaran ukuran sektor modern dengan mempertahankan tingkat upah di kedua sektor. *Kedua*, tipologi pertumbuhan *pengayaan (enrichment) sektor modern*. Di sini perekonomian memang tumbuh, tetapi yang benar-benar menikmati buah pertumbuhan itu hanya terbatas pada segelintir orang yang berkecimpung di sektor modern, sedangkan jumlah pekerja maupun tingkat upah kaum pekerja di sektor tradisional tetap. *Ketiga*, tipologi pertumbuhan *pengayaan (enrichment) sektor tradisional*. Dalam tipologi pertumbuhan ini, hamper semua manfaat pertumbuhan tercurah secara merata ke para pekerja di sektor tradisional, dan hanya sedikit saja atau bahkan tak ada yang dinikmati oleh sektor industri modern.

Ketiga tipologi ini menawarkan prediksi yang berbeda-beda mengenai apa yang akan terjadi terhadap ketimpangan pendapatan akibat pertumbuhan ekonomi. Dengan pengayaan sektor modern, ketimpangan akan semakin meningkat, sementara dalam kondisi yang memperkaya sektor tradisional, ketimpangan akan semakin menurun. Sebaliknya, dengan perluasan sektor

modern, mula-mula ketimpangan akan meningkat dan setelahnya menurun (Todaro, 2006).

Pertumbuhan ekonomi daerah berbeda-beda intensitasnya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas ekonomi dan ketimpangan wilayah. Myrdal dan Friedman dalam Solihin (2012) menyebutkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan daerah akan menuju kepada divergensi. Hirschman dalam Solihin (2012) mengemukakan konsep pengembangan wilayah yaitu dalam suatu wilayah atau daerah yang cukup luas hanya terdapat beberapa titik pertumbuhan (growth center), dimana industri berada pada suatu kelompok daerah tertentu sehingga menyebabkan timbulnya daerah pusat dan daerah belakang (hinterland). Untuk mengurangi ketimpangan ini perlu memperbanyak titik-titik pertumbuhan baru.

Menurut Hirschman, seperti dikutip oleh Solihin (2012) bila terjadi pembangunan di suatu wilayah akan terdapat daya tarik kuat yang menciptakan konsentrasi pembangunan dan tergantung pada potensi wilayah yang dimiliki masing-masing wilayah. Sedangkan Esmara seperti dikutip oleh Solihin (2003) menyatakan konsep pusat pertumbuhan sebagai alat perumusan kebijaksanaan yang seringkali menjadi pertentangan antara kepentingan wilayah dan nasional terutama dalam penentuan lokasi dan dapat menimbulkan pertumbuhan yang tidak seimbang.

## **2.2 Tinjauan Empiris**

Telah banyak penelitian mengenai ketimpangan wilayah di Indonesia, baik yang dalam skala nasional, maupun dalam skala regional. Beberapa penelitian tentang ketimpangan wilayah yang menjadi tinjauan penelitian empiris penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Suyanto (2010) yang meneliti *Flypaper Effect Theory* Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal yang memfokuskan pada data APBD, mengemukakan bahwa kebijakan dana desentralisasi membuat daerah otonom semakin tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluarannya. Di sisi lain, kebijakan dana desentralisasi mendorong timbulnya *flypaper effect*, sehingga peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer dari pemerintah pusat telah mendorong peningkatan pengeluaran daerah otonom secara lebih besar dibandingkan peningkatan pada kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini dapat terjadi kemungkinan adanya *asymmetri information*. Peningkatan dana desentralisasi telah mendorong pengeluaran daerah otonom menjadi semakin besar dibandingkan peningkatan pada kemampuan kapasitas fiskal daerah. Adanya keleluasaan daerah otonom dalam menyusun anggaran, serta menggunakan anggaran yang dimilikinya telah menyebabkan penurunan kemampuan kapasitas fiskal daerah, akibatnya daerah otonom kabupaten dan kota menjadi semakin tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana desentralisasi. Selain itu, terjadinya penurunan koefisien ketimpangan fiskal vertikal daerah otonom pada pemerintah kabupaten dan kota ini disebabkan oleh meningkatnya tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan pada pemerintah kabupaten dan kota sesuai sasaran kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal.

Uzantha (2011) yang meneliti Analisa Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan persamaan regresi berganda dengan data panel serta metode yang digunakan adalah GLS (*General Least Square*) dengan *Cross-*

*Section Weight* dan *White Cross-Section* yang telah dilakukan untuk mengetahui Analisis Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat selama 8 tahun periode penelitian yaitu 2002-2009, bahwa tingkat ketimpangan/kesenjangan wilayah antar kabupaten/kota Sumatera Barat selama pelaksanaan desentralisasi fiskal mengalami penurunan setiap tahunnya. Dengan melihat penurunan tingkat ketimpangan/kesenjangan wilayah dalam beberapa tahun terakhir, maka pelaksanaan desentralisasi fiskal berjalan baik dalam menurunkan kesenjangan wilayah. hal ini mengindikasikan bahwa terjadi pemerataan pembangunan di kabupaten/kota Sumatera Barat.

Malahayati (2007) yang meneliti tentang Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Kawasan Timur Indonesia, menunjukkan bahwa Kawasan Timur Indonesia memiliki ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota yang cukup besar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut cenderung menurun pada tahun 1996-2004. Nilai CVw yang diperoleh pada tahun 1993 sebesar 0,99113, sedangkan pada tahun 1996 nilainya meningkat menjadi 0,99136, dan pada tahun 1998 menurun menjadi 0,99077.

Fatimah (2007) yang meneliti tentang Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesia, mengemukakan hasil bahwa Indeks ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia dengan indikator PDRB konstan 1993 berada pada kondisi ketimpangan yang tinggi terkecuali pada tahun 1998-1999 yang berada pada kondisi ketimpangan yang sedang. Jika mengeluarkan sektor migas dalam perhitungan, maka terlihat adanya kondisi

ketimpangan yang tinggi dari tahun 1993-1997. Dimulai dari masa krisis (1998) sampai masa diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal (2004) ketimpangan berada pada kondisi yang sedang. Sedangkan indeks ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia dengan indikator PDRB harga berlaku baik dengan atau tanpa sektor migas berada pada kondisi ketimpangan yang tinggi. Dan Pada masa kebijakan desentralisasi fiskal dilaksanakan, tingkat pemerataan pendapatan antar propinsi di Indonesia lebih baik daripada sebelum kebijakan ini diterapkan.

Siagian (2010) yang meneliti tentang Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat), Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan persamaan regresi berganda (*Simultaneous regression*) dengan Model berulang (*Recursive Models*) serta metode yang digunakan adalah PLS (*Panel Least Square*) dengan *Cross-Section Weight* dan *White Cross-Section* yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat selama lima tahun periode penelitian yaitu 2004 – 2008, bahwa Ketimpangan wilayah yang terjadi di Propinsi Jawa Barat, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal. Pertama, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini disebabkan saling berbedanya kemampuan antar masing-masing daerah atau wilayah di Propinsi Jawa Barat dalam hal pertumbuhan ekonomi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah juga akan mendorong peningkatan ketimpangan wilayah. Kedua, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan wilayah. Secara umum akan menurunkan

ketimpangan, antara lain; peningkatan derajat desentralisasi fiskal, penyesuaian rasio pajak daerah, dan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, akan mendorong ketimpangan semakin rendah. Tetapi untuk tingkat aglomerasi wilayah atau daerah justru memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah, yang maksudnya proses pengkotaan yang bervariasi di tiap daerah akan mendorong semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dari kesimpulan tersebut maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima. Maka dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah, baik secara positif maupun negatif hubungannya.

### **2.3 Kerangka Pikir Penelitian**

Keberhasilan ekonomi suatu negara biasanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun demikian, terdapat satu ukuran yang lebih representatif dalam melihat keberhasilan ekonomi suatu negara ini, yaitu dilihat dari segi kesejahteraan masyarakatnya dan hal ini dapat dilihat melalui dimensi pemerataan (*equality*). Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan dalam kesejahteraan golongan masyarakat (antara golongan kaya dan golongan miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antar daerah atau ketimpangan wilayah. Maka dapat dipahami jika masalah ketimpangan atau kesenjangan antar daerah selalu menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah di Indonesia.

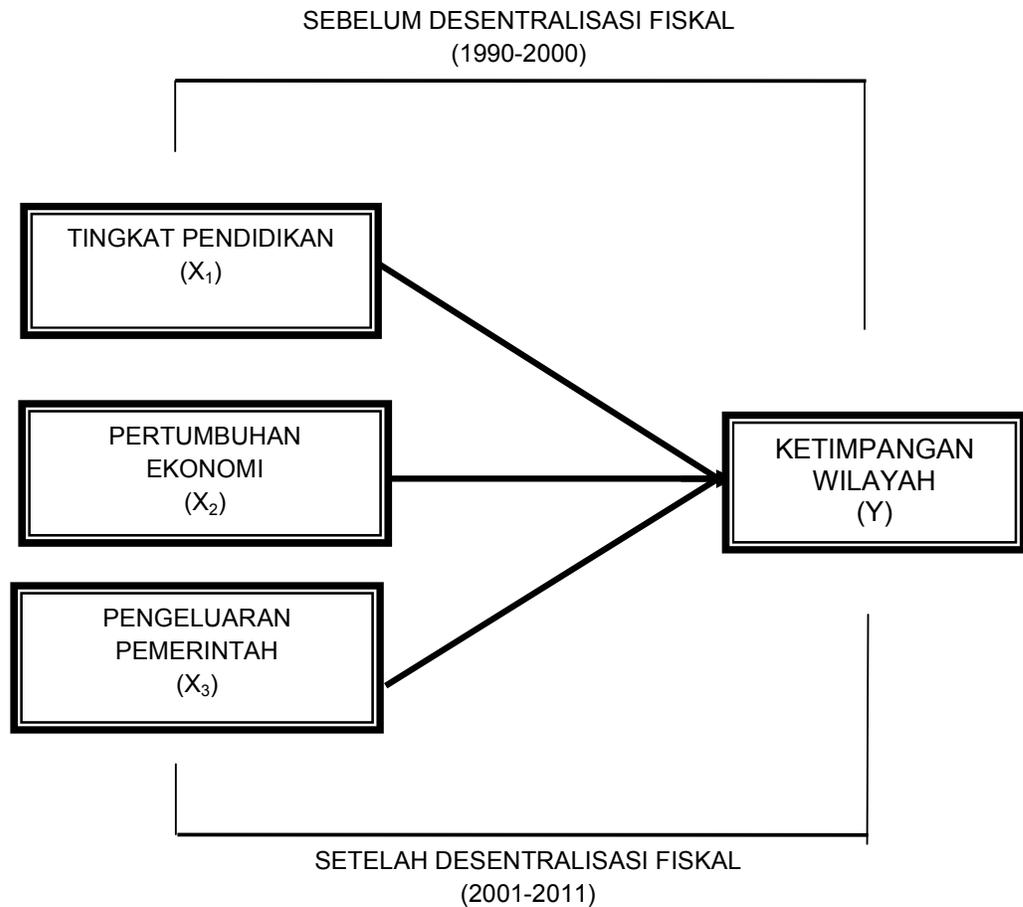
Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah yang bersangkutan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan nilai PDRB. Melalui pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah-daerah yang terbelakang agar mampu bersaing dengan daerah-daerah maju, sehingga dapat memperkecil ketimpangan wilayah. Namun hal ini masih sangat menjadi tanda tanya besar dengan melihat kenyataan yang ada sekarang, dimana hanya daerah yang kaya yang juga menikmati hasil dari pertumbuhan ekonominya.

Ketimpangan yang terjadi antar daerah, baik daerah miskin maupun daerah kaya juga disebabkan karena adanya perbedaan dari faktor pendidikan, jumlah maupun kualitas penduduknya, SDA, letak geografisnya, kesehatan, dan lain-lain. Hal tersebut yang bisa menyebabkan pertumbuhan pendapatan di suatu daerah ada yang tinggi dan ada yang rendah dan juga yang menyebabkan munculnya ketimpangan wilayah.

Faktor lain yang berpengaruh adalah Pengeluaran pemerintah yang mempunyai hubungan negatif dengan ketimpangan wilayah, semakin besar komposisi pengeluaran pemerintah dalam bidang pembangunan akan mengurangi ketimpangan wilayah serta desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap semakin meningkatnya ketimpangan wilayah akibat alokasi Dana Alokasi Umum yang lebih besar kepada daerah yang juga memiliki sumber daya alam yang kaya, sehingga akan menimbulkan kesenjangan antar daerah yang semakin melebar.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**



## 2.4 Hipotesis

1. Diduga ada perbedaan signifikan ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang semakin meningkat setelah desentralisasi fiskal..
2. Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dan ada pengaruh negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan baik sebelum maupun setelah desentralisasi fiskal.